**PERAN DIPLOMASI PARLEMEN**

**Forum dan Pertemuan Internasional**

* The 2025 Session of the Parliamentary Union of OIC Members States (PUIC) Conference and other related meetings
* The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit "Stronger Parliaments for Sustainable Recovery"
* The 144th IPU Assembly and Related Meetings
* World Parliamentary Forum on Sustainable Development
* The 4th MIKTA Speakers' Consultation "Creating Peace and Prosperity: The Role of Parliament"
* Indonesia Pacific Parliamentary Partnership

**ISU INTERNASIONAL**

**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

Tahun 2015 merupakan tahun yang bersejarah dalam kerangka pembangunan global, yaitu berakhirnya target pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan dimulainya komitmen negara-negara di dunia untuk mencapai **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)** pada 2030. Ada perbedaan utama dalam struktur penyusunan dan rencana implementasi MDGs dan SDGs, yaitu keterlibatan dan peran parlemen yang semakin diakui.

Pada 25 September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi berjudul *“Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”*, sebuah dokumen aspiratif yang dengan tegas menyebutkan pentingnya peran parlemen dalam mencapai SDGs. Parlemen dengan fungsi-fungsinya, yaitu **legislasi, anggaran, dan pengawasan**, dapat memastikan terlaksananya kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian SDGs secara efektif.

Resolusi tersebut menggarisbawahi pentingnya kontribusi serta kerja sama erat dan *engagement* antara Parlemen, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organ-organ PBB, masyarakat adat, masyarakat sipil, pelaku usaha, dan akademisi dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang tercakup dalam SDGs secara komprehensif, yaitu aspek **pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup**.

Indonesia secara khusus memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 melalui peran aktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Presiden Ellen Johnson Sirleaf (Liberia), dan Perdana Menteri David Cameron (Inggris) sebagai Ketua *High Level Panel of Eminent Person (HLPEP) on Post-2015 Development Agenda*. Berbagai inisiatif yang lahir melalui HLPEP terangkum dalam laporan Sekjen PBB berjudul: *“A life of Dignity for All.”* Selanjutnya, melalui rangkaian pertemuan *Open Working Group on SDGs (OWG)*, dihasilkan dokumen *OWG Proposals on SDGs* yang memuat **17 Tujuan dan 169 Target** untuk agenda pembangunan global pasca-2015.

Dengan 300 indikator, SDGs merupakan gerakan global yang sangat inklusif. Oleh karena itu, kemitraan dan kolaborasi di tingkat bilateral maupun multilateral merupakan faktor penting yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan tantangan dan mencari solusi terbaik untuk pencapaian SDGs.

Untuk menunjang upaya pencapaian SDGs secara menyeluruh, **BKSAP DPR RI** senantiasa mendukung Pemerintah Daerah untuk berinisiatif dalam menjalin kerja sama internasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di tingkat global, **BKSAP DPR RI** berhasil memposisikan Indonesia sebagai *role model* dalam upaya pencapaian SDGs. Pada tahun 2017, BKSAP DPR RI menggagas terbentuknya **“World Parliamentary Forum on Sustainable Development/WPFSD”**, yaitu forum antarparlemen pertama di dunia yang didedikasikan khusus untuk membahas isu pembangunan berkelanjutan. Selain itu, BKSAP juga merupakan pihak yang pertama kali mengusulkan agar SDGs dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia menjadi **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)** agar lebih dekat dengan masyarakat luas.

**Lingkungan dan Perubahan Iklim**

Isu lingkungan merupakan isu hangat yang sudah menjadi topik global. Organisasi-organisasi lingkungan dunia berusaha menyadarkan masyarakat global akan arti pentingnya *sustainable environment*. Isu lingkungan selalu dihubungkan dengan berbagai isu lain seperti keterbatasan energi, kerusakan ekosistem, dan ketahanan pangan. Kerusakan lingkungan saat ini sebagian besar disebabkan oleh pembangunan selama berpuluh-puluh tahun, yang mengakibatkan **efek gas rumah kaca** dan **pemanasan global**.

**Paris Agreement**, sebagai kelanjutan dari Protokol Kyoto, adalah bentuk kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Parlemen memiliki peran krusial dalam pengesahan legislasi, persetujuan anggaran, dan pengawasan untuk memastikan implementasi komitmen lingkungan, terutama SDGs. Sejalan dengan prinsip *leave no one behind*, DPR RI pada tahun 2016 telah mengesahkan undang-undang terkait Paris Agreement, menunjukkan bahwa isu ini adalah agenda penting.

Melalui diplomasi luar negeri, **BKSAP DPR RI** secara aktif ikut serta dalam berbagai konferensi internasional seperti pertemuan tahunan Parlemen dalam **UNFCCC (COP)**. Dalam COP-22 di Maroko, delegasi Indonesia menyampaikan komitmen kuat untuk mengatasi perubahan iklim. Pada Sidang Umum IPU ke-139, disepakati resolusi *emergency item* **“Climate Change”** yang direspons tegas oleh delegasi DPR RI dengan mendorong negara-negara anggota IPU untuk mewujudkan komitmennya sesuai Paris Agreement.

Untuk mendukung pencapaian SDGs, BKSAP juga membentuk **Panitia Kerja (Panja) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)** yang bertugas meningkatkan kesadaran anggota Parlemen dan menjadi gerbang diplomasi parlemen untuk isu-isu SDGs.

**Era Digital dan Revolusi Industri 4.0**

Perkembangan teknologi internet telah membuat dunia berada dalam genggaman. Pada akhir 2018, lebih dari setengah populasi dunia (51.2% atau 3.9 miliar orang) telah menggunakan internet. Digitalisasi membawa transformasi di berbagai bidang, termasuk industri, perdagangan, hingga demokrasi. Namun, perkembangan ini juga membawa kecemasan terkait **otomatisasi pekerjaan**, terutama bagi negara dengan bonus demografi seperti Indonesia.

BKSAP menawarkan solusi melalui **pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan pemuda**, serta peningkatan keterampilan di bidang pendidikan vokasi. Dalam berbagai forum internasional, BKSAP menyuarakan pentingnya menyambut peluang teknologi digital sambil mewaspadai dampak negatifnya, seperti penyebaran **berita palsu (hoax)** yang dapat merusak demokrasi.

Salah satu kontribusi terbaru BKSAP adalah melalui Sidang Umum **ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)** pada September 2018, di mana Delegasi Indonesia mensponsori Resolusi bertema pemberdayaan perempuan di era revolusi industri 4.0. Resolusi ini menekankan perlunya parlemen di kawasan ASEAN mengidentifikasi dan mengamandemen UU agar perempuan dapat memetik manfaat dari teknologi digital, sekaligus memitigasi risiko terkait privasi dan keamanan.

**Gender dan Partisipasi Perempuan**

Meskipun jumlah anggota parlemen wanita di dunia meningkat sejak **Beijing Platform for Action** tahun 1995, kemajuannya masih lambat. **SDGs Tujuan nomor 5** secara khusus ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan menjamin partisipasi penuh perempuan di tingkat pengambilan keputusan.

**DPR RI** sangat aktif dalam meningkatkan peran wanita di Parlemen, salah satunya dengan menyelenggarakan seminar untuk memperingati *International Women’s Day*. DPR RI juga terlibat aktif dalam sidang-sidang internasional seperti *Parliamentary Event on the Occasion of the Commission on the Status of Women* yang diselenggarakan oleh IPU.

**Dr. Nurhayati Ali Assegaf** merupakan satu-satunya anggota Dewan *Women Political Leaders Global Forum (WPL)* dari Indonesia yang aktif memperjuangkan hak-hak wanita. Melalui fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, anggota parlemen dapat mendukung kesetaraan gender dengan menyusun UU yang relevan, mengadopsi anggaran sensitif gender, dan mendorong pemerintah melaksanakan pengarusutamaan gender.

Di tingkat regional, BKSAP aktif menyuarakan isu gender melalui **WAIPA** (acara tahunan AIPA). Ketua BKSAP juga telah menginisiasi pembentukan organisasi parlemen perempuan di tingkat Asia melalui **Women of Asian Parliamentary Assembly (WAPA)** dan di tingkat Asia Pasifik melalui **Women of Asia Pacific Parliamentary Forum (WAPPF)** untuk pembahasan isu gender yang lebih intensif.

**Isu Kemanusiaan**

Konflik, peperangan, dan persekusi terus menjadi penyebab utama migrasi paksa. Isu **Palestina, etnis Rohingya, serta perlindungan HAM pengungsi dan migran** mendominasi panggung kemanusiaan internasional. Sejalan dengan amanat konstitusi, DPR terus berkomitmen dalam penegakan HAM.

**Kemerdekaan Palestina**

Isu Palestina menjadi sorotan utama diplomasi kemanusiaan DPR. Melalui berbagai forum seperti **PUIC** dan **APA**, DPR aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina. DPR menyerukan persatuan antara Fatah dan Hamas serta menentang kebijakan kontroversial seperti pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

**Etnis Rohingya**

DPR berada di garis depan dalam memperjuangkan HAM etnis Rohingya. Pada sidang **AIPA** tahun 2017, DPR mendorong sikap tegas parlemen ASEAN dan menginisiasi resolusi terkait krisis kemanusiaan di Myanmar. DPR juga berhasil meminta penjelasan dari parlemen Myanmar mengenai upaya perdamaian dalam sidang IHL pada pertemuan IPU ke-139.

**Perlindungan HAM Pekerja Migran**

Melalui **UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**, DPR menjamin HAM dan perlindungan hukum, ekonomi, serta sosial bagi pekerja migran. DPR juga berhasil mendorong adopsi resolusi perlindungan pekerja migran di forum **APPF** dan aktif menyuarakan kepentingan Indonesia dalam penyusunan **Global Compact for Migration (GCM)**.

**Good Governance**

**Parlemen Terbuka: Gerbong Terdepan dalam Jaringan Keterbukaan Parlemen**

Salah satu elemen krusial demokrasi adalah perwujudan *good governance*. DPR berkomitmen menjadi lembaga legislatif modern yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui **Deklarasi Parlemen Terbuka** pada 29 Agustus 2018.

Melalui deklarasi ini, DPR secara resmi bergabung dalam mekanisme multilateral **Open Government Partnership (OGP)** dengan mengajukan **Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen 2018-2020** yang terpisah dari pemerintah. Inisiatif ini bermula dari partisipasi aktif DPR dalam *the 2nd Global Legislative Openness Conference* di Ukraina pada 2017.

RAN Keterbukaan Parlemen yang disusun DPR bersama masyarakat sipil berbasis prinsip *co-creation* ini mencakup lima pilar: (i) transparansi data legislasi, (ii) penggunaan teknologi informasi, (iii) transparansi informasi publik, (iv) peta jalan parlemen terbuka, dan (v) kelembagaan.

Dengan langkah ini, DPR RI menjadi salah satu dari sedikit parlemen di Asia Pasifik yang memiliki RAN Keterbukaan Parlemen terpisah dari pemerintah, menempatkan Indonesia sebagai pionir keterbukaan parlemen di tingkat global.